

PENGELOLAAN WISATA HALAL DI SITUS GUHA JEPANG GAMPONG BLANG PANYANG KOTA LHOKSEUMAWE ACEH

BOBBY RAHMAN¹, RASYIDIN², TEUKU MUZAFFARSYAH³, ZULHILMI⁴

Program Studi Administrasi Publik¹, Program Studi Ilmu Politik^{2,3,4}

Universitas Malikussaleh

Jl. Cot Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara – Aceh 24351

*e-mail: bobby.rahman@unimal.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this service is to realize community service planning conducted with Forum Group Discussion (FGD) in Gampong Balang Panyang with Gampong Leadership, Tuha Peut and other youth figures and Stake holders. There are several problems behind this devotion, namely the management of tourism things have not been managed properly in accordance with Islamic law, the method of Devotion Activities is based on the principle of participatory towards all parties involved. Planning together, conducting activities, monitoring and evaluating together the extent of the progress of the activities. As a result, This Japanese Guha tourist site can also be a means of education as well as an additional literacy about the history of the past. Of course, this becomes a picture that the management must be maximized and the development to all citizens in developing halal tourism potential in the historical site. in conclusion, the management of Guha Japan Tourism Site became the authority of the Lhokseumawe City Government through the Tourism Office and the Education and Culture Office. This makes the management of Japan Guha tourism has not been maximized.

Keywords: *Tourism Management, Halal Tourism, Islamic Sharia, Guha Jepang*

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian ini merealisasikan perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan Forum Group Discussion (FGD) di Gampong Balang Panyang dengan Pimpinan Gampong, Tuha Peut dan Tokoh pemuda serta Stake holder lainnya. Ada beberapa masalah yang melatarbelakangi pengabdian ini yaitu pengelolaan secara wisata hal belum dikelola secara baik sesuai dengan syariat Islam, metode Kegiatan Pengabdian didasari pada prinsip partisipatoris terhadap semua pihak yang terlibat. Melakukan perencanaan secara bersama, melakukan aktifitas, monitoring dan mengevaluasi bersama sejauh mana progres kegiatan berlangsung. Hasilnya Situs wisata Guha Jepang ini juga bisa menjadi sarana edukasi serta menjadi tambahan literasi tentang sejarah masa lalu. Tentunya hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa pengelolannya harus maksimal dan adanya pembinaan kepada seluruh warga dalam menumbuhkembangkan potensi wisata halal di situs bersejarah tersebut. kesimpulannya bahwa pengelolaan Situs Wisata Guha Jepang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini membuat pengelolaan wisata Guha Jepang belum maksimal.

Kata Kunci: *Pengelolaan Wisata, Wisata Halal, Syariat Islam, Guha Jepang*

PENDAHULUAN

Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Gampong yang ada di sekitar kampus Universitas Malikussaleh. Gampong ini memiliki situs wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Sudah sepatutnya Universitas Malikussaleh mendukung program ini secara komprehensif dan menyeluruh, karena program pengabdian ini merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi disamping Pendidikan dan Penelitian.

Hasil obsevasi awal di tempat lokasi wisata tersebut atau Guha Jepang belum tersedia infrastruktur yang memadai baik tempat shalat atau mushalla, kamar mandi serta pemandu wisata yang benar-benar Islami. Pada hal sarana tersebut sangat mendukung wisata Islami di kawasan situs wisata tersebut. Konsep wisata halal (*Halal Tourism*) harus diberlakukan di situs Guha Jepang karena berkaitan dengan sistem norma yang berlaku di Aceh yaitu Syariat Islam. Dari proses *road show* dan observasi tersebut, diketahui begitu pentingnya untuk segera dilakukan, terutama untuk membenahi situs Guha Jepang yang ada di Gampong Blang Panyang. Selain itu situs bersejarah ini merupakan sebuah tempat wisata yang harus memberikan gambaran tentang konsep wisata halal.

Halal bukan saja pada produk yang digunakan namun pada konsep pariwisata juga perlu diberlakukan. Lazimnya tempat wisata tersebut sering diramaikan oleh generasi muda. Selain itu fasilitas yang belum memadai dalam aspek Islami sehingga memberikan peluang terjadinya hal-hal yang diluar batas dan bertentangan dengan konsepsi syariat Islam yang berlaku di Aceh. Hal ini memberi sebuah gambaran bahwa wisata halal di situs Guha Jepang harus dilestarikan karena hal ini mampu mendatangkan sebuah *income* bagi masyarakat Gampong Blang panyang. Namun

hal tersebut tidak terlalu dikembangkan sehingga tempat wisata Guha Jepang hanya sebatas seremoni diawal dengan banyaknya pengunjung dari berbagai daerah datang. Namun permasalahannya adalah semakin banyak fenomena yang muncul diluar batas norma dan adat di Gampong Blang Panyang.

Pengembangan konsep wisata islami mestinya perlu dikembangkan khususnya di Kota Lhokseumawe. Hal tersebut dapat dimulai dari salah satu wisata yang sangat fenomenal yaitu Situs Guha Jepang. Maka perlu dilakukan pengembangan melalui mekanisme pengabdian. Dari kesalahan dalam menggunakan sarana sistem wisata lazim membuat dimensi *Halal Tourism* sehingga konsepsi berdasarkan syariat Islam masih sangat minim dalam kunjungan para wisatawan ke Guha Jepang di Gampong Blang Pulo. Selain itu proses penerapan sistem kunjungan dengan nuansa Islami dalam objek wisata. Pola penerapan wisata halal di situs Guha Jepang masih belum memadai sehingga perlu adanya skema yang tepat dalam mewujudkannya. Keprihatinan mendalam ketika pola perilaku pemuda, remaja dan pelajar tidak hanya di beberapa tempat wisata di Kota Lhokseumawe bahkan Aceh secara keseluruhan mulai melenceng dari Syariat Islam. (Ala-Hamarneh. 2011)

Konsep wisata halal di situs Guha Jepang seharusnya diterapkan selain berkaitan dengan esensi moralitas dan norma juga adanya fasilitas yang mendukung untuk kebutuhan wisatawan. Pergaulan mulai melenceng dari nilai-nilai keagamaan, semangat mempelajari ilmu keagamaan terus berkurang, peran keluarga berkurang. Tentu, Aceh sebagai daerah syariat Islam perlu melakukan pembenahan secara khusus dan komprehensif berkaitan dengan pola perilaku pemuda, remaja dan pelajarnya, demi mewujudkan cita cita penerapan syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekah. Mengingat pemuda, remaja dan pelajar merupakan cerminan masa depan suatu bangsa. Tentu Kondisi pola perilaku masa

kini sangat menentukan kondisi dan situasi masa depan Aceh. Untuk itu, perlu adanya langkah *preventif* dari berbagai kalangan dalam rangka menghindari pudarnya nilai nilai agama dan budaya di kalangan Masyarakat Aceh. (Arby, I. 2017)

Pengabdian ini merupakan program yang secara holistik dan komprehensif melibatkan civitas akademika, mitra Desa, Pemerintah Daerah, Asosiasi media termasuk mahasiswa, alumni, dan stakeholders, dengan tujuan melahirkan Konsep wisata halal (*Halal Tourism*) di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat menjadi Desa Pencontohan dalam konsepsi Gampong Wisata Islami. Proses dalam melahirkan Gampong wisata Islami, tentu tidak jauh berbeda dengan proses melahirkan Gampong Adat dengan nama “*Gampong Meusilinya Adat Yang Berbasis Syariat*” di Kota Lhokseumawe. Masyarakat yang berada di Gampong Blang Panyang belum terbiasa dengan konsepsi wisata Halal (*Halal Tourism*) yang seharusnya diterapkan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian wisata halal (*halal Tourism*) didasari pada prinsip partisipatoris terhadap semua pihak yang terlibat. Melakukan perencanaan secara bersama, melakukan aktifitas, monitoring dan mengevaluasi bersama sejauh mana progres kegiatan berlangsung. Dosen Ilmu Politik berperan sebagai fasilitator didampingi oleh mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan pengalaman dalam mendampingi masyarakat serta aparatur Gampong dan pemuda. Sedangkan Asosiasi Media, pemerintah Daerah, stakeholders akan dilibatkan secara simultan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut;

Tahapan *pertama*, Need Assesment/ pemetaan terhadap kondisi situs Guha Jepang Gampong Blang Panyang agar dapat

ditentukan langkah-langkah selanjutnya secara profentif yang cocok untuk dilaksanakan di Gampong tersebut. Pemetaan ini melibatkan penyelenggara dari pihak dosen, mahasiswa, aparatur desa dan ketua pemuda. Tahapan *kedua*, penentuan strategi pengembangan wisata Halal yang cocok dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan situasi di Desa sasaran. Penentuan media literacy dengan memakai pendekatan *humanities* yang berupaya memproteksi pemuda, remaja dan pelajar dari apa yang dipersepsi sebagai efek buruk media. Tahapan *ketiga*, sosialisasi dan demonstrasi bagaimana pendekatan *inoculationist* berfungsi dalam penguatan dan memahami dampak buruk dari media. Tahapan ini fasilitator dari kalangan dosen, asosiasi media, mahasiswa serta warga desa yang memiliki kemampuan *expert* dalam pengembangan wisata Halal.

Tahapan *keempat*, ialah implementasi program, yaitu bagaimana sasaran program menggunakan media secara cerdas dan kritis. Tahapan ini perlu proses pendampingan. Tahap *kelima*, melahirkan Komunitas Gampong wisata Halal. Tahap *Keenam*, melibatkan stakeholders pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya dalam melahirkan program Gampong wisata Halal. Tahap *ketujuh* ialah mengajak pemerintah Daerah melakukan perlombaan Gampong wisata Halal bagi masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada di tingkat Gampong dengan melibatkan berbagai stakeholders. (Wahidati dan Sarinastiti. 2018)



Gambar 1. Alur pelaksanaan program pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dapat disajikan dalam bentuk tabel/ gambar/ foto disertai dengan penjelasan dari hasil kegiatan.

a. Lokasi Pengabdian

Sesuai dengan yang direncanakan bahwa lokasi Pengabdian ini berada di lokasi situs Wisata Guha Jepang Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe. Lokasi berada 6 km dari pusat Kota Lhokseumawe. Disini banyak menyimpan sejarah yang belum di Eksplor oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, diantaranya ada Cot Ramlah, dia dikenal sebagai penyebar paham komunis di sekitar Aceh utara dan daerah pase pada umumnya, dia dibunuh disekitar Wiasata Guha Jepang tersebut pada tahun 1965. Disamping itu

terdapat juga kuburan Tgk Muslimin yang syahid pada saat melawan penjajahan Belanda sekitar 1900. Tentunya informasi ini perlu disampaikan dalam mempromosikan Situs Wisata Guha Jepang yang ada di wilayah Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.



Gambar 2. Tim pengabdian melakukan kajian awal ke lokasi

Situs wisata Guha Jepang ini juga bisa menjadi sarana edukasi serta menjadi tambahan literasi tentang sejarah masa lalu. Tentunya hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa pengelolaannya harus maksimal dan adanya pembinaan kepada seluruh warga dalam menumbuhkembangkan potensi wisata halal di situs bersejarah tersebut. Penting untuk melakukan promosi karena selama pengelolaannya tidak efektif hal ini tidak terlepas dari peran dinas terkait yang minim dan tidak responsive. Selanjutnya pengelolaan Situs Wisata Guha Jepang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini membuat pengelolaan wisata Guha Jepang belum maksimal dan belum menyentuh aspek syariat (*halal tourism*). (Abdul Hamid, I. 2010).

b. Gambaran Lokasi Wisata Guha Jepang

Area perbukitan Cot Panggoi yang berada di Gampong Blang Payang Kecamatan Muara Satu yang merupakan Kecamatan Pemekaran dari kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Guha Jepang ini menyimpan sejarah zaman kemerdekaan sekaligus keindahan alam. Gua (*bunker*)

peninggalan Jepang masih kokoh berdiri di lokasi yang tidak jauh dari Pantai Ujong Bate yang merupakan lokasi Wisata alam dikelola secara profesional. Guha yang pernah digunakan tempat persembunyian tentara Jepang ini terletak di Dusun Ule Bukir Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe. Guha ini dibangun di atas gunung di ketinggian 400-an meter dan dibangun pada masa Perang Dunia II. Hal ini dilakukan para serdadu Jepang untuk melakukan pertahanan diri dari serangan tentara sekutu. Penggalian dilakukan di wilayah perbukitan tersebut sehingga membentuk sebuah Guha yang mampu menampung serdadu Jepang dalam upaya invansi sekutu.

Guha yang dibangun Jepang tidak jauh dari Pesisir Utara Kota Lhokseumawe ini dulu berfungsi untuk pertahanan, persembunyian dan tempat pengintaian bagi tentara Jepang. Guha ini dibangun pada tahun 1942-1945 dengan memanfaatkan warga sekitar (pribumi) melalui kerja Romusha. Setidaknya terdapat sejumlah gua yang terpisah. Gua ini terbuat dari beton dan memiliki luas serta kedalaman lorong yang berbeda-beda. Di dalamnya ada tempat duduk, ada juga yang berfungsi untuk dapur, tempat pengintaian melalui lubang-lubang. (Battour, etc. 2012)

Guha tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang dan juga untuk menyimpan senjata. Tentu nilai sejarah sangat besar di situs Guha Jepang ini. Guha Jepang merupakan bangunan peninggalan militer Jepang pada masa perang dunia 2 terutama untuk mengantisipasi serangan rakyat Aceh melalui Samudera Hindia. Luas keseluruhan area Gua Jepang seluas 12 hektar. Namun ada keinginan Warga Gampong Blang Panyang ingin situs bersejarah tersebut diserahkan secara penuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Artinya Situs Guha Jepang ini diharapkan bisa dikelola oleh pemerintah Gampong Blang Panyang dengan melibatkan masyarakatnya. Situs tersebut seharusnya dapat dikembangkan lagi menjadi tempat wisata

halal (*Halal Tourisme*). Hal ini dikarenakan tempat pariwisata tersebut berada di wilayah Aceh yang lazimnya menerapkan aturan Syariat Islam. Kawasan situs Guha Jepang ini apabila dapat dikelola dengan baik dan diserahkan kepada Gampong Blang Panyang oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini juga dapat membawa dampak pada kesejahteraan warga Blang Panyang yang berada di area Situs Guha Jepang terdapat keterangan tertulis yang terpasang di pinggir jalan.

Guha yang dibangun di pegunungan ini dahulu sebagai strategi pertahanan serdadu Jepang. Namun sekarang menjadi situs bersejarah yang perlu dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah sehingga wisata halal dapat terwujud. Situasi Situs bersejarah tersebut meliputi antara satu gua dengan gua lainnya dihubungkan dengan fasilitas jalan-jalan berparit. Di lokasi tersebut juga dilengkapi lapangan untuk upacara atau keperluan kemiliteran. Guha ini dibangun di sekitar pantai sebagai strategi untuk mengantisipasi pendaratan tentara pribumi disepanjang Pantai Laut Utara Kota Lhokseumawe. Berkunjung ke lokasi ini, selain dapat mengetahui sejarah juga bisa menikmati indahnya matahari saat kembali ke peraduannya. Di tempat ini juga terdapat lokasi yang dinamakan “Puncak Bukulah” yang terletak di Arah Timur Lokasi Guha Jepang untuk menikmati terbitnya mata hari pada pagi hari. Tempat ini bagus dan memiliki daya tarik tersendiri dan dapat melihat pesisir pantai dari atas perbukitan. Sayangnya tempat ini kurang dipromosikan dan dikelola secara baik sehingga wisata ini menjadi kurang maksimal dalam pengelolaannya. (Din. 1989).

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan aturan Syariat Islam seharusnya dapat mengembangkan situs Guha Jepang menjadi objek wisata halal yang menarik di Kota Lhokseumawe. Namun realitas di lapangan hal ini tidak memberikan respon yang baik dari pemerintah Kota Lhokseumawe melalui dinas terkait. Padahal pengelolaan situs pariwisata Guha Jepang sangat potensial dan

mampu menambah pendapatan perekonomian masyarakat di sekitar wisata bersejarah tersebut. Pengelolaan dan strategi promosi seperti menjadi sebuah kendala sehingga perkembangan wisata Guha Jepang belum begitu menarik bagi pengunjung atau wistawan lokal maupun luar daerah. (Hamzah, etc. 2004)

Umumnya para wisatawan hanya sekali saja berkunjung ke situs Guha Jepang tersebut hanya untuk memastikan rasa penasaran akan megahnya situs bersejarah itu. Padahal sarana dan prasarana disekitar Situs bersejarah tersebut sudah baik, namun kurangnya pengelolaan dan tidak sistematis manajemen pengelola tempat wisata tersebut. Nuansa islami dan bersyariat juga kurang maksimal dilakukan sehingga banyak kasus pelanggaran syariat terjadi. Tentunya hal ini menjadi stagnan dan berimbas kepada semakin menurun daya tarik wisatawan untuk berkunjung kembali ke situs wisata Guha Jepang. Selanjutnya standar operasional prosedur (SOP) dari pengelola tidak ada sehingga semua manajemen berjalan apa adanya. (Hamdan, etc. 2013)



Gambar 3. Tim pengabdian melakukan observasi dan analisis lokasi

Perkembangan wisata Guha Jepang akan terkoneksi dengan situs bersejarah lainnya serta wisata lainnya yang ada di Gampong Blang Panyang. Potensi untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*) sangat besar jika pengelolaannya bisa dioptimalkan. Seharusnya Pemerintah Kota Lhokseumawe melibatkan secara umum

masyarakat Gampong Blang Panyang. Penemuan Guha Jepang pertama kali ketika ada tim pencari fakta yang didalamnya juga melibatkan seorang warga Gampong Blang Panyang Pak Marzuki yang pertama kali memperkenalkan situs bersejarah tersebut. Dan pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui dinas terkait. Diawal kemunculan wisata Guha Jepang menjadi perbincangan dari semua lapisan masyarakat. Sehingga pertama diresmikan situs Pariwisata Guha Jepang semakin menggema sehingga banyak orang yang penasaran dan ingin melihat secara langsung. Bahkan omset pengelolaan bisa menembus pendapatan hingga puluhan Juta Rupiah perhari.

Persoalan muncul ketika pengelola tidak terpusat pada masyarakat di satu Gampong. Hal ini membuat sebagian masyarakat Gampong Paloh Dayah dan Meuria Paloh juga merasa berhak untuk ikut mengelola. Tentunya terjadi perdebatan sehingga situs Guha Jepang belum begitu memadai dalam pengelolaannya belum lagi gambaran mengenai semakin kurang Islaminya wajah Guha Jepang sehingga perlu ada pembenahan masyarakat dalam menciptakan parwisata halal di Aceh. Situs Guha Jepang selain bernilai sejarah juga dapat menjadi ikon paling penting bagi Lhokseumawe umumnya dan khusus untuk Gampong Blang Panyang. (Rahman,etc. 2013)

c. Proses Kegiatan/Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi program Pengabdian Kepada Masyarakat di lokasi wisata Guha Jepang yang dilaksanakan di Gampong tersebut telah dilaksanakan. Antusias Tokoh masyarakat dan Perangkat pemerintah Gampong Blang Panyang, aktivitas *Forum Group Discussion* (FGD)/ berkaitan dengan peberdayaan pengelolaan Wisata halal (*Halal Tourism*) Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan Keuchik Gampong dan jajarannya, Sekretaris Gampong, Lembaga Tuha Peut, Tuha Lapan, para kepala dusun

serta unsur kepemudaan dan tokoh perempuan.

Aspek pemberdayaan pengelolaan Wisata Halal atau *Halal Tourisme* di situs Guha Jepang terdapat berbagai masalah yang diperlukan oleh pengelola situs tersebut. Kepemilikan situs Guha Jepang ini masih dijalankan oleh dua dinas di lingkungan pemerintah kota Lhokseumawe yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara legalitas belum diserahkan pengelolaannya kepada Gampong Blang Panyang. (Razalli, etc. 2012).



Gambar 4. Tim Pengabdian melakukan FGD dengan masyarakat

Berkaitan dengan pengelolaan situs ini juga belum mengikuti peraturan syariat Islam yang sesuai dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, dan ketentuan yang ditentukan OIC (*Organization of Islamic Countries*). Ternyata di Lokasi wisata Guha Jepang tersebut juga terdapat berbagai persoalan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum termasuk kami pengabdian. Misalkan biaya parkir kendaraan para wisatawan yang belum ada standarnya sehingga para petugas parkir mengutipnya secara bebas tanpa standard, ini juga menjadi kendala tersendiri bagi para pengunjung atau wisatawan. Hal ini yang perlu dibina dan didampingi oleh tim sehingga pengabdian dapat optimal dan bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Lokasi-lokasi wisata Guha Jepang belum sepenuhnya dikelola oleh Gampong Blang Panyang secara keseluruhan, karena masih dikelola oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Dengan demikian pemerintah Gampong tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk pengelolaannya. Pengelola situs Guha Jepang harus diberikan kepada masyarakat Gampong Blang Panyang melalui peralihan pengelolaan dengan pembagian PAD antara Gampong Blang Panyang

Konsep wisata halal akan menjadi branding serta ikon bagi Kota Lhokseumawe sehingga pendapatan ekonomi masyarakat meningkat. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran cara mempromosikan dalam meningkatkan perekonomian. Peluang harus diberikan bagi masyarakat Gampong Blang Panyang dalam mengembangkan wisata Guha Jepang sehingga memiliki konsep *halal tourism*. Tentunya hal ini mengandalkan sumberdaya masyarakat Gampong sebagai pengelola sehingga dapat berjalan maksimal.

Perangkat Gampong Blang Panyang dapat melakukan audiensi dengan adanya pendampingan dari tim pegabdian sehingga mampu membuat pengelolaan wisata Guha Jepang dapat dialihkan kepada Gampong oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan pembagian PAD antara pemerintah Gampong dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini, pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Gampong Blang Panyang.

Proses pengelolaan lokasi wisata Guha Jepang tersebut diharapkan dikelola sesuai dengan syariat Islam sehingga menjadi Wisata Halal (*Halal Tourisme*) dengan menerapkan segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. wisata yang menarik minat wisatawan baik dari lokal hingga sampai ke turis asing. Disamping itu pengelolaannya agar didampingi oleh kementerian pariwisata sehingga lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Hamid, I. 2010. *Islamic compliance in hotel and restaurant business. Paper presented at the Asia-Euro Conference: Transformation and modernisation in tourism, hospitality and gastronomy.*
- [2] Ala-Hamarneh. 2011. *Islamic tourism: A Long Term Strategy of Tourist Industries in the Arab World After 9/11, Centre for Research on The Arab World, 2011.* [Online]. Available:<http://www.staff.uni-mainz.de/alhamarn/>. [Accessed: October. 5, 2018]
- [3] Arby, I. 2017. *Apa itu Wisata Syariah atau Halal Tourism?*. [Online]. Available:http://muhaiminzul.lecture.ub.ac.id/files/2017/02/10.Wisata_Syariah_Halal_Tourism.pdf. [Accessed: May. 18, 2020]
- [4] Battour, M., Battor, MM, dan Ismail MN. 2012. *The Mediating Role of Tourist Satisfaction: A Study of Muslim Tourists in Malaysia.* *Journal of Travel and Tourism Marketing.* 29(3): 279-297.
- [5] Din, H. 1989. *Islam and Tourism Patterns, Issues, and Options.* *Annals of Tourism Research.* 16: 542– 563.
- [6] Hamdan, H., Issa, ZM., Abu, N, dan Jusoff, K. 2013. *Purchasing Decisions among Muslim Consumers of Processed Halal Food Products.* *Journal of Food Products Marketing.* 19(1): 54-61.
- [7] Hamzah, A. (2004). *Policy and Planning of The Tourism Industry in Malaysia.* Paper presented at The 6th ADRF General Meeting, Bangkok, Thailand
- [8] Rahman, RA., Rezei, G., Mohamed, Z., Shamsudin, MN, dan Sharifuddin, J. 2013. *Malaysia as Global Halal hub: OIC Food Manufacturers' Perspective.* *Journal of International Food and Agribusiness Marketing.* 25: 154-166.
- [9] Razalli, MR., Abdullah, S, dan Hassan, MG. 2012. *Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges.* Working Paper. Universiti Utara Malaysia
- [10] Wahidati, L, dan Sarinastiti, EN. 2018. *Perkembangan Wisata Halal di Jepang.* *Jurnal Gama Societai.* 1(1): 9-19. W